

KEBIJAKAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA MENGENAI PENDIDIKAN BAGI KAUM BANGSAWAN DI INDONESIA TAHUN 1900-1920

Widi Indah Lestari, Maskun, Syaiful. M

FKIP Unila : Jln. Soemantri Brojonegoro, no. 1 Bandar Lampung

Telepon (0721) 704 947 faximile (0721) 704 624

e-mail : widiindah18gmail.com

081369120620

Abstracted: Dutch East Indies Government ability regarding education for the count in Indonesia in 1900-1920. This research aims to know state of the implementation of the Dutch East Indies government ability in the field of education for the nobility in Indonesia in 1900-1920. The method is the historical research methods. The method is the historical research methods. The collection data technique used documentation an literation study, while the analysis of the data used is analysis of qualitative data. The results showed that the Dutch East indies government's education policy is given to the Indonesian people are preferred for the nobility Bumiputera. Dutch East Indies government policy of education for the nobility in Indonesia is in the form of the estabilishment of school institution. School that established by the Ducth government for the nobility in Indonesia, among which: ELS (*Europese Lagere School*) an elementary school Europe , HBS (*Hogere Burger School*)is a high school , HIS (*Hollandse Inlandse School*) an elementary school for the children of the people honored Bumiputera, dan OSVIA (*Opleiding School Voor Inlandsche Ambteneren*) an elementary school.

Key word : Ability, education and nobility

Abstrak : Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Mengenai Pendidikan Bagi Kaum Bangsawan Di Indonesia Tahun 1900-1920. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam bidang pendidikan bagi kaum bangsawan di Indonesia tahun 1900-1920. Metode yang digunakan adalah metode penelitian historis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan dan dokumentasi sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda yang diberikan kepada masyarakat Indonesia lebih diutamakan bagi kaum bangsawan Bumiputera. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam bidang pendidikan bagi kaum bangsawan di Indonesia adalah dalam bentuk pendirian lembaga-lembaga sekolah. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda bagi kaum bangsawan di Indonesia diantaranya yaitu ELS (*Europese Lagere School*) merupakan sekolah dasar Eropa, HBS (*Hogere Burger School*) merupakan sekolah lanjutan menengah, HIS (*Hollands Inlandse School*) merupakan sekolah dasar bagi anak-anak dari orang-orang terhormat bumiputera dan OSVIA (*Opleiding School Voor Inlansche Ambteneren*) merupakan sekolah dasar.

Kata kunci : Kebijakan, Pendidikan dan kaum bangsawan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan tiga aspek dalam diri seseorang dalam kehidupannya, yaitu pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup. Bangsa Indonesia telah

mengalami berbagai bentuk praktek pendidikan, pertama dimulai dari praktek pendidikan Hindu, pendidikan Budha, pendidikan Islam, pendidikan zaman Vereenigde Oest Indische *Compagnie* (VOC), pendidikan kolonial Belanda, pendidikan zaman pendudukan Jepang dan zaman setelah merdeka hingga sekarang, akan tetapi

pendidikan Belanda yang sangat melekat di Indonesia, antara lain dari bentuk sekolah, kelas dan susunan tempat duduk, sangat persis dengan pendidikan Belanda dulu.

Pendidikan yang dilaksanakan oleh Belanda pada awalnya hanya diterapkan untuk memenuhi kebutuhan para pegawai Belanda beserta keluarganya yang memerlukan pendidikan dan latihan, baik mengenai pengetahuan umum maupun mengenai pengetahuan khusus tentang Indonesia (Depdikbud. 1986:11). Ini berarti pendidikan Barat hanya tersedia bagi pihak Belanda sendiri, yang kemudian memberikan kebijakan bagi golongan yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa dan Barat serta anak-anak *Priyayi*. Perkembangan pendidikan di Indonesia semakin mendapat tahapan barunya menjadi lebih progresif ketika memasuki tahun 1900. Ketika Van Deventer menjabat sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda dan menerapkan sebuah kebijakan baru yang dikenal sebagai Politik Etis (Politik Balas Budi). Dengan motto “*de Eereschuld*” (hutang Kehormatan) dan slogan “*Educatie, Irrigatie, Emigratie*” (Pendidikan, Irigasi, Emigrasi). Akan tetapi program politik etis ini ternyata menjadi program yang merugikan rakyat, karena pendidikan yang diberikan diharapkan dapat mengurangi dasar pendidikan nasional bangsa Indonesia seperti patriotisme, gotong royong, berdikari dan sebagainya (Ary. H. Gunawan. 1986:19).

Sistem pendidikan Belanda diatur dengan sistem prosedural yang ketat dalam pelaksanaannya. Pendidikan yang diberikan dibedakan berdasarkan tiap-tiap golongan stratifikasi sosial. Pendidikan yang diberikan pemerintah Hindia Belanda lebih diutamakan bagi para golongan bangsawan dan yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa. Untuk menentukan status seseorang dalam masyarakat kolonial, pemerintah Belanda berpegangan pada penghasilan. Dengan perhitungan tertentu maka yang berpenghasilan di atas f1. 1.200 setahun dianggap sebagai golongan yang mempunyai status yang cukup tinggi. Dalam dunia kepegawaian, ini berlaku bagi pangkat asisten wedana ke atas (Marwati Djoened. P dan Nugroho Notosusanto. 1993:143). Sekolah-sekolah yang disediakan oleh pemerintah

Hindia Belanda bagi kaum bangsawan di Indonesia yaitu: *Europese Lagere School* (ELS) merupakan sekolah dasar Eropa yang pada dasarnya diperuntukan bagi keturunan Belanda yang kemudian memberikan kebijakan pada para keturunan raja untuk memasukinya, *Hollandse Inlandse School* (HIS) merupakan sekolah dasar yang diperuntukkan bagi para bangsawan pribumi yang pada kenyataannya golongan rakyat biasa juga dapat memasuki sekolah ini, *Hogere Burger School* (HBS) merupakan sekolah menengah dan sekolah lanjutan bagi lulusan ELS dan *Opleiding School Voor Inlandshe Ambteneren* (OSVIA) merupakan sekolah dasar yang pada bahasa sehari-hari biasa disebut dengan Sekolah Raja.

Titmuss mengidentifikasi kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan pada tujuan-tujuan tertentu (Edi Suharto, 2005:7). Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu berupa pendirian lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kaum bangsawan adalah orang-orang keturunan raja-raja. Bagi orang Jawa kedudukan seseorang itu ditentukan oleh prinsip kebangsawanan yang ditentukan oleh hubungan darah dengan raja yang berkuasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Hindia Belanda mengenai pendidikan bagi kaum bangsawan di Indonesia pada masa kolonial Belanda di Indonesia tahun 1900-1920.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Hindia Belanda mengenai pendidikan bagi kaum bangsawan

di Indonesia tahun 1900-1920. Langkah-langkah dalam penelitian historis, yaitu heuristik adalah proses mencari untuk menemukan sumber-sumber sejarah, peneliti mencari sumber sejarah berupa buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian, kritik adalah penyaringan terhadap sumber-sumber sejarah yang telah ditemukan. Dalam penelitian ini kritik di bagi menjadi dua bagian yaitu kritik eksternal yaitu peneliti memeriksa kebenaran dan seleksi terhadap sumber sehingga peneliti dapat memastikan keaslian dari dokumen yang didapat, yang kedua kritik internal yaitu memilih sumber-sumber yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti, interpretasi adalah pemberian penafsiran terhadap data-data yang diperoleh dan diurutkan sehingga menjadi sebuah urutan peristiwa yang dapat diterima akal sehat, dan historiografi adalah proses penyusunan secara menyeluruh dari hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan mengenai peristiwa sejarah yang diteliti secara sistematis. Untuk mendukung kelancaran dalam penelitian ini dalam pengumpulan data teknik yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan dan teknik dokumentasi. Teknik studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, misalnya koran, naskah, majalah, catatan-catatan, kisah sejarah, dokumentasi dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat. 1983:420). Sedangkan teknik dokumentasi adalah proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun baik berupa tulisan, lisan, gambar dan arkeologi (Nugroho Notosusanto. 1983: 38).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia pada awalnya hanya bertujuan untuk berdagang. Mereka dimotivasi oleh hasrat untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, sekalipun harus mengarungi laut yang berbahaya sejauh ribuan kilometer dalam kapal layar kecil untuk mengambil rempah-rempah di Indonesia. Sejak kedatangan Belanda sebagai penguasa politik yang memiliki modal raksasa

dan perusahaan-perusahaan besar yang bergerak pada bidang pertanian, pertambangan dan pabrik merupakan wujud daripada bentuk imperialisme modern yang senantiasa menampakkan dirinya sebagai kesatuan dalam seluruh aktivitas kolonial yang selalu berupaya menguasai seluruh wilayah kolonialnya secara sungguh-sungguh. Usaha pemerintah untuk memperluas pendidikan dan penyebaran Bahasa Belanda yang dianggap penting pada saat itu dikalangan Bumiputera waktunya bertepatan dengan hasrat bangsa Hindia Belanda yang ingin mendapatkan pendidikan dan ingin maju. Pada zaman kolonial Belanda pelayanan pendidikan dibedakan menjadi dua kategori yaitu Sekolah Dasar dan lanjutan untuk golongan penduduk Eropa dan Sekolah Dasar dan Sekolah Raja untuk golongan penduduk pribumi (Depdikbud. 1986:16). Sebelum pertengahan abad-19, lembaga pendidikan dapat dimasuki berdasarkan pada kelas sosial. Sekolah umum merupakan sekolah privat dengan biaya yang mahal. Anak-anak dari keluarga menengah ke bawah sulit untuk sekolah, dikarenakan ketidakmampuan dalam biaya pendidikan. Pendidikan pada masa kolonial Belanda dibuat berjenjang dan tidak berlaku untuk semua kalangan.

Kebijakan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan negeri jajahannya ternyata menuai kritik dari warga Belanda. Van Hoevell mengkritik pemerintah Belanda yang hanya menyiapkan beberapa gelintir orang saja untuk menjalankan roda pemerintahan, tidak untuk memuaskan keinginan orang Jawa pada pendidikan. Pendidikan yang diberikan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia hanya untuk menciptakan tenaga-tenaga kerja murah yang terdidik. Bahasa Belanda menjadi syarat *Klein Ambtenaarse* atau ujian pegawai rendah pemerintah pada tahun 1864 (S. Nasution. 1987:7). Pegawai sedapat mungkin dipilih dari anak-anak kaum ningrat yang telah mempunyai kekuasaan tradisional dan berpendidikan untuk menjamin keberhasilan perusahaan (S. Nasution. 1987:12). Dalam pelaksanaan pendidikan Barat pemerintah

Hindia Belanda cenderung berprinsip sesuai dengan landasan prinsip pendidikan pada zaman Hindia Belanda yaitu: pemerintah berusaha untuk tidak memihak salah satu agama tertentu, tidak diusahakan untuk hidup selaras dengan lingkungannya tetapi lebih ditekankan agar anak didik dikemudian hari dapat mencari pekerjaan demi kepentingan kolonial, sistem persekolahan disusun menurut adanya perbedaan lapisan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia khususnya yang ada di pulau Jawa, pada umumnya pendidikan diukur dan diarahkan untuk membentuk golongan elit sosial agar dapat dipakai sebagai alat bagi kepentingan atau keperluan supremasi politik dan ekonomi Belanda di Indonesia (Depdikbud. 1986:86).

Pembukaan sekolah pribumi berdasarkan sebatas kebutuhan praktis pemerintah Belanda. Pendidikan dikhususkan pada anak-anak golongan priyayi. Dengan kebijakan tersebut diharapkan penduduk yang lebih rendah statusnya dapat mudah ditundukkan dikarenakan pemerintah Belanda telah memegang kendali golongan priyayi yang merupakan kaum elit (M.C. Rickfles. 2001:27). Sistem pendidikan yang dualistik pada masa ini juga membuat garis pemisah yang tajam antara dua subsistem, sistem sekolah Eropa dan sistem sekolah pribumi. Akan tetapi pada tahun 1892 akhirnya dilakukan restrukturisasi terhadap sistem persekolahan karena kebutuhan yang sangat besar terhadap pegawai rendahan yang bisa berbahasa Belanda yaitu: Sekolah Kelas Satu (ongko sidji) atau *eerste klasse* adalah sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari pemuka-pemuka, tokoh-tokoh pemuka dan orang-orang yang terhormat Bumiputera. Sekolah Kelas Dua (ongko loro) atau *tweede aklasse* sekolah bagi anak-anak penduduk Bumiputera pada umumnya (Depdikbud. 1986:93).

Pada akhir abad ke-19 telah terjadi perubahan politik di negeri Belanda yang sangat berpengaruh pada politik pemerintahan Belanda di Indonesia. “Politik Kolonial Liberal” telah ditanamkan dan diatur oleh Belanda sejak tahun 1870 yang menekankan kesejahteraan orang pribumi sebagai tanggung jawab moral dari pemerintah terhadap orang-orang Indonesia, berubah ke

arah “Politik Kolonial Etis” yang menyatakan bahwa pemerintah memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pada tahun 1899 terbit sebuah artikel oleh seorang berkebangsaan Belanda, Van Deventer berjudul “Hutang Kehormatan” (*Een Eereschuld*) dalam majalah De Gids, yang berisi kerisauan kaum intelektual Belanda terhadap humanisasi Hindia Belanda yang telah terpengaruh kapitalisme. Munculnya artikel tersebut memicu perubahan yang sangat drastis pada kebijakan-kebijakan pemerintah Belanda terhadap penduduk jajahan di Hindia Belanda, yaitu dengan dicanangkannya politik etis atau politik balas budi secara resmi pada tahun 1901 oleh Ratu Belanda. Rekaman surat-surat antara para pejabat pendidikan (Khususnya kementrian, Agama dan Kerajinan), Menteri Tanah Jajahan dan Gubernur Jenderal mengenai kebijakan pendidikan di Hindia Belanda dalam kurun waktu 1900-1940 menunjukkan secara jelas bahwa sejak abad ke-20 telah terjadi arus balik dari pendidikan yang elitis menuju pendidikan yang lebih populis.

Kebijakan pendidikan merupakan pemberian kesempatan untuk bersekolah bagi rakyat jajahan. Maka perluasan besar-besaran jumlah sekolah dilakukan oleh pemerintah Belanda. Pembukaan sekolah tersebut kemudian juga membuka peluang untuk pembukaan sekolah-sekolah guru untuk penyediaan guru. Hal ini terbukti pada tanggal 16 Desember 1901 jumlah siswa sekolah guru di Bandung ditambah dari 50 menjadi 100 orang, di Yogyakarta dari 75 menjadi 100 orang, di Probolinggo dari 75 menjadi 100 orang, di Semarang dibuka sekolah guru baru dengan siswa sebanyak 100 orang. Walaupun nampaknya baik tujuan akan didirikannya bentuk-bentuk persekolahan, namun dalam prakteknya meskipun tidak secara langsung terdapat kecenderungan diskriminatif dan materialistik. Kecenderungan ini nampak dalam hal cara penyaringan anak sekolah. Caranya adalah dengan memberlakukannya biaya sekolah yang cukup mahal dan sering juga diutamakan bagi keluarga yang memiliki darah biru (darah ningrat, darah kraton) atau

dari kalangan priyayi (pangreh praja atau pegawai dalam kantor pemerintahan Belanda). Bagi anggota masyarakat yang kurang berpunya atau miskin terpaksa tidak dapat memasukkan anak-anaknya ke sekolah.

Pendidikan yang dilaksanakan pihak kolonial ternyata memiliki suatu pendekatan, cara atau sistem dalam mengoprasionalkan mekanisme pendidikan kepada rakyat pribumi. Pendekatan atau sistem pendidikan yang diterapkan Belanda terhadap rakyat jajahannya adalah *meterealistis* dan diskriminatif. Pihak Belanda sangat berhati-hati dalam memberikan pendidikan agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan mereka yaitu untuk menghasilkan tenaga pekerja yang sangat dibutuhkan namun di sisi lain tidak dapat membahayakan bagi kedudukan pihak penjajah di Hindia. Belanda akan selalu menggunakan berbagai cara dalam segala tindakannya dalam melindungi kepentingan ekonominya. Hal ini tentu saja pemerintah Hindia Belanda tetap mempertahankan dan

memprioritaskan modal kaum kapitaslis untuk kepentingan mereka dan tidak untuk kepentingan rakyat jajahannya. Kepentingan ekonomi yang menguntungkan ini tentu saja diperoleh melalui eksploitasi dan diskriminasi. Dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian Barat yang ada di Hindia Belanda, maka pemerintah Belanda terpaksa menyelenggarakan pendidikan bagi rakyat Bumiputera yang bertujuan untuk mendidik tenaga terampil yang dapat dipekerjakan pada perusahaan dan berbagai bidang lainnya.

Kebijakan pemerintah Belanda dalam memberikan kesempatan untuk bersekolah bagi rakyat jajahannya tidak disia-siakan oleh bangsa pribumi, walaupun Belanda hanya sebatas mendirikan sekolah rendah atau sekolah dasar membuat seluruh lapisan masyarakat pribumi ingin memperoleh kesempatan belajar, yang kemudian memaksa pemerintah Hindia Belanda untuk memperbanyak pendirian sekolah dasar tersebut.

Tabel 1.
Perkembangan Sekolah Dasar dan Murid Antara Tahun 1900-1920

Tahun	Sekolah Dasar	
	Sekolah	Murid
1900	1.584	188.000
1905	2.156	186.000
1910	4.540	334.000
1915	8.255	694.000
1920	12.494	866.000

Sumber: L.F. Van Gent dalam Sumarno Mestoko. 1987. Pendidikan di Indonesia dari Zaman ke Zaman. Hal 60.

Lulusan dari pendidikan Belanda diharapkan untuk menjadi tenaga administrasi pertanian dan industri sebagai tenaga pekerja kelas dua dengan upah rendah. Tidak ada diantara rakyat Bumiputera yang menduduki posisi jabatan tinggi, mereka hanya menduduki jabatan rendahan yang tidak mempunyai wewenang dan pengaruh pada jabatannya. Politik etis dibidang pendidikan yang bertujuan mensejahterakan dan meningkatkan kecerdasan dan perbaikan hidup rakyat jajahan hanyalah kebohongan belaka.

Diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda adalah diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial ini terlihat dari didirikannya sekolah yang membedakan antara sekolah yang dikhususkan bagi kaum

bangsawan dan sekolah untuk rakyat biasa. Dalam pelaksanaan pendidikan yang diperuntukkan bagi setiap golongan sudah sangat terencana dan terprogram dengan baik yang merupakan suatu rangkaian kesatuan dari sekolah rendah sampai sekolah tinggi. Sekolah yang diperuntukkan bagi anak Bumiputera tidak direncanakan secara sistematis, segalanya berjalan berdasarkan keadaan zaman, kebutuhan dan kehendak kolonial. Tidak adanya persekolahan yang tetap dan selalu dengan ketidak stabilan dengan berbagai perubahan di dalamnya sehingga terkesan bahwa pemerintah Belanda tidak memiliki keseriusan dalam menangani masalah pendidikan bagi bangsa Bumiputera, segalanya hanya sebagai percobaan dalam

pemenuhan kebutuhan kepentingan Belanda. Kecenderungan diskriminasi yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda salah satunya nampak pada hal cara penyaringan penerimaan murid. Kebijakan yang dibuat pemerintah Belanda dalam memberlakukan diskriminasinya tidak terlepas dari penyediaan tenaga pengajar yang syarat bahwa pengganti raja harus telah menempuh pendidikan tertentu. Pemerintah Belanda menginginkan bahwa para calon raja tersebut berpendidikan, pengetahuannya berbobot dibandingkan dengan raja-raja terdahulu. Maka dari itu mengenai pendidikan bagi putera-putera yang akan ditunjuk menjadi pengganti raja, Gubernur Jenderal memutuskan perlunya putera-putera raja yang telah ditunjuk menjadi raja untuk memasuki Sekolah Rendah Eropa yaitu ELS sedekat mungkin dengan tempat kediamannya, kemudian masuk salah satu dari Sekolah OSVIA di Jawa atau Sekolah Kepala Bumiputera (*Hoofdenschool*) di Tondano, dengan kebebasan bagi mereka yang terbukti cakap atau yang orang tuanya lebih menyukai untuk masuk HBS 5 tahun (Depdikbud. 1977: 40).

Dalam suatu proses pendidikan tentunya ada suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berwenang, yaitu pemerintah untuk menerbitkan kondisi peserta didik dan sekolah-sekolah yang layak untuk menerima peserta didik dengan menggunakan kriteria tertentu agar memberikan hasil dan pencapaian yang baik dan sesuai dengan harapan dari pihak Belanda. Maka kebijakan-kebijakanpun diterapkan pada pendirian lembaga-lembaga pendidikan di Hindia Belanda. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut adalah: Gradualisme yang luar biasa untuk penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia, Belanda membiarkan penduduk Indonesia dalam keadaan yang hampir sama sewaktu mereka menginjakkan kaki, pendidikan tidak terlalu diperhatikan. Dualisme, diartikan berlaku dua sistem pemerintahan, pengadilan dari hukum tersendiri bagi golongan penduduk, pendidikan dibuat terpisah, pendidikan bagi anak Indonesia berada ditingkat terbawah.

terdiri dari tenaga guru untuk Sekolah Dasar yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan guru (Sumarsono Mestoko. 1987:58), bahkan lulusan sekolah kelas dua dianggap layak menjadi guru.

Pemerintah Hindia Belanda memegang hak dalam penunjukkan anak para raja dalam menggantikan posisi raja, dengan Kontrol yang sangat kuat, pemerintah Belanda di bawah kontrol Gubernur Jenderal yang menjalankan pemerintahan atas nama Raja Belanda, pendidikan dikontrol secara sentral, guru dan orang tua tidak mempunyai pengaruh langsung pada politik pendidikan. Pendidikan didirikan dengan tujuan berguna untuk merekrut pegawai perkebunan sebagai tenaga kerja yang murah. Prinsip konkordasi yang menjaga agar sekolah di Hindia Belanda mempunyai kurikulum dan standar yang sama dengan sekolah di negeri Belanda, anak Indonesia tidak berhak bersekolah di pendidikan Belanda. Tidak adanya organisasi yang sistematis, pendidikan dengan ciri-ciri tersebut hanya merugikan anak-anak kurang mampu, Pemerintah Belanda lebih mengutamakan keuntungan ekonomi daripada perkembangan pengetahuan anak-anak Indonesia (S. Nasution. 1987:20). Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut pemerintah Belanda selalu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: menggolongkan stratifikasi masyarakat sesuai keturunan atau status sosial, pemerintah berusaha untuk tidak memihak salah satu agama tertentu, anak didik diciptakan untuk dapat mencari pekerjaan demi kepentingan kolonial, sistem persekolahan disusun menurut adanya perbedaan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia, pembukaan sekolah-sekolah didasarkan akan kebutuhan pemerintah kolonial atau pengusaha bukannya kebutuhan rakyat pribumi.

Sekolah-sekolah yang dapat ditempuh oleh anak-anak keturunan bangsawan di Indonesia pada masa politik etis adalah ELS, HBS, HIS dan OSVIA. ELS merupakan Sekolah Dasar pada zaman kolonial Belanda di Indonesia. ELS menggunakan bahasa pengantar Bahasa Belanda yang dapat dimasuki oleh anak-anak keturunan Belanda dan anak-anak golongan bangsawan (anak raja) dengan lama belajar 7 tahun. ELS mulai

berdiri pada tahun 1817 di Batavia (Jakarta). Nama *Europese Lagere School* sendiri baru dipakai pada tahun 1902 sebagai pengganti

nama *Onderwijs een Lagere School voor Europeanen*. Jumlah sekolah ELS ini seiring dengan berjalannya waktu selalu bertambah.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah ELS

Tahun	Jumlah Sekolah	Tahun	Jumlah Sekolah	Tahun	Jumlah Sekolah
1817	1	1890	144	1905	184
1820	7	1895	159	1910	191
1833	19	1900	169	1915	195
1858	57			1920	196

Sumber: S. Nasution. 1987. Sejarah Pendidikan Indonesia. Hal 91.

Sebelum masuk ELS ada sekolah Taman Kanak-Kanak (*Frobel*). Selain itu juga ada sekolah persiapan untuk masuk ELS bagi anak-anak bukan keturunan Eropa, agar anak-anak tersebut mendapat pelatihan berbicara Bahasa Belanda sehingga pada saat masuk ELS mereka sudah mampu mengikuti kelas satu ELS yang menggunakan pengantar Bahasa Belanda. Batas usia masuk ELS antara 6 sampai 16 tahun, tetapi khusus untuk anak Eropa dan anak-anak dari perkawinan campuran wanita Eropa dengan laki-laki Bumiputera dapat memasuki ELS sebelum usia 6 tahun, sedangkan anak-anak Bumiputera yang akan menjadi murid di ELS harus cukup usianya dan masih akan diseleksi. ELS sedianya diperuntukkan bagi orang Eropa dan mereka yang disamakan statusnya kemudian dirumuskan sebagai sekolah untuk pendidikan Eropa yang membuka jalan bagi anak Indonesia untuk memasukinya. Anak-anak Indonesia tidak ditolak, selama jumlah anak Indonesia dalam

jumlah yang kecil. Bahkan dianggap penting menerima anak-anak aristokrasi memasuki ELS untuk mempererat hubungan antar kedua bangsa. Akan tetapi penambahan anak Indonesia yang di luar batas dirasakan sebagai ancaman dan banyak alasan yang dikemukakan untuk membatasi penambahan penerimaan anak Indonesia selanjutnya. Adapun kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam membatasi jumlah anak Bumiputera yang semakin meningkat dalam memasuki sekolah ELS adalah: anak Indonesia tidak boleh melebihi usia 7 tahun agar dapat diterima (ini tidak berlaku bagi anak Belanda), penerimaan anak bukan keturunan Belanda jangan menyebabkan ditolaknya penerimaan anak keturunan Belanda karena kekurangan tempat, untuk Indonesia dikenakan pembayaran uang sekolah yang lebih mahal, anak Indonesia tidak boleh tinggal di kelas yang sama lebih dari dua tahun (tidak berlaku bagi anak keturunan Belanda) (S. Nasution. 1987:100).

Tabel 3. Jumlah Murid di ELS

Tahun	Jumlah anak Belanda	Jumlah anak Indonesia	Jumlah seluruhnya	Presentase anak Indonesia
1890	11.421	808	12.377	6,5
1895	12.690	1.135	14.010	8,1
1900	13.592	1.545	15.462	10,0
1905	15.105	3.752	19.382	19,3
1910	17.526	3.453	24.514	14,0
1915	19.712	4.187	25.002	16,7
1919	20.703	5.285	27.315	19,2

Sumber : Data dari Algemeen Verslag Europsch Onderwijs 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1915, 191) (S. Nasution, 1987: 104).

Dari data yang telah diperoleh dijelaskan bahwa dalam penerimaan murid di ELS dengan mempertimbangkan kedudukan orang tuanya, murid yang diperbolehkan memasuki ELS merupakan anak-anak dari keturunan raja (*Priyayi*). Maka dari data tersebut di atas

merupakan jumlah keseluruhan anak bangsawan yang masuk ke ELS.

Kurikulum yang diberlakukan untuk ELS sebenarnya telah ditentukan pada peraturan tahun 1893 yang terdiri atas mata pelajaran membaca dan menulis dalam bahasa

daerah, huruf daerah dan latin, membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu, berhitung, ilmu bumi Indonesia, ilmu alam, sejarah pulau tempat tinggal, mengukur tanah, menggambar dan semua pelajaran yang diajarkan di Sekolah Guru kecuali ilmu mendidik boleh diajarkan setelah mendapat persetujuan dari inspektur atau pemimpin sekolah tersebut. Namun setelah memasuki abad ke-20 pemerintah mulai mengembangkan sistem pendidikan di ELS dengan menyetujui penyebaran Bahasa Belanda dikalangan penduduk Indonesia terutama penyebaran dalam sistem pengajaran di sekolah ELS, dengan memberlakukan Bahasa Belanda sebagai mata pelajaran pokok. Dalam penyediaan tenaga guru dipilih guru-guru yang langsung didatangkan dari negeri Belanda. Pada tahun 1912 ELS mendapatkan kesulitan dalam penyediaan guru yang dapat berbahasa Belanda untuk itu pemerintah Belanda mengambil keputusan untuk melatih calon-calon guru dari penduduk Bumiputera yang nantinya akan dipekerjakan sebagai guru bantu di ELS.

Selama beberapa dekade ELS merupakan satu-satunya sekolah yang memberi persiapan untuk ujian pegawai rendah (*Klein Ambtenaar*) dan untuk melanjutkan pelajaran ke HBS dan seterusnya ke universitas, juga untuk Sekolah Dokter Djawa dan OSVIA (sekolah pamong praja). ELS memberi jalan yang lebih terjamin dan pendek untuk kelanjutan pelajaran. ELS+HBS hanya $7+5 = 12$ tahun hanya sekali ujian dengan harapan lulus, HIS+MULO+AMS = $7+4+3 = 14$ tahun harus ditempuh dua kali ujian dengan harapan lulus jauh lebih kecil, Sekolah Desa+*Schakelschool*+MULO+AMS = $3+5+4+3 = 15$ tahun ujian seleksi tiga kali

dengan harapan lulus sangat kecil. Kualitas ELS selalu lebih tinggi daripada HIS dalam kenyataan pendidikan dan juga dalam mata para majikan. Standar akademis ELS sama dengan yang ada di Nederland, penguasaan bahasa Belanda jauh lebih tinggi karena banyak kesempatan menggunakannya dalam pergaulan antar murid. ELS adalah sekolah elit yang memberi prestis tinggi kepada anak dan orang tua. Demi itu orang tua anak Indonesia rela memberi pengorbanan finansial yang sebenarnya beban yang telampau berat untuk dipikul (S. Nasution. 1987:102-103).

HBS merupakan sekolah lanjutan tingkat menengah pada zaman Hindia Belanda bagi orang Eropa dan bagi golongan elit Bumiputera. Pada awalnya HBS bernama sekolah *Gymnasium* dengan masa belajar 3 tahun kemudian pada tahun 1867 nama *Gymnasium* diubah menjadi HBS (*Hogere Burger School*) dengan lama belajar 5 tahun. Pada tahun 1864 didirikan HBS pertama di Batavia (Jakarta), 1875 di Surabaya, 1877 di Semarang. Pada tahun 1882 didirikan HBS 3 tahun untuk anak wanita di Jakarta. Untuk perkembangan selanjutnya akan didirikan HBS 5 tahun di Bandung.

HBS sedianya diperuntukkan bagi murid-murid Belanda dan golongan baik yang sanggup menyekolahkan anaknya ke ELS yang mengajarkan Bahasa Perancis sebagai syarat masuk HBS. Selama hampir seperempat abad HBS tidak menerima murid wanita. Faktor-faktor yang menyebabkan kecilnya jumlah murid Bumiputera antara lain sulitnya bagi anak Indonesia memasuki ELS “Kelas Satu” untuk memperelajari Bahasa Perancis dan ketidak sanggupannya membayar tingginya uang sekolah sebesar f-15.

Tabel 4. Jumlah dan Persentase Murid Di HBS

Tahun	Jumlah Murid			Persentase		
	Belanda	Indonesia	Cina	Belanda	Indonesia	Cina
1900	622	13	4	97,4	2,0	0,6
1905	618	36	15	91,6	5,4	2,8
1910	819	50	60	88,1	5,4	6,5
1915	915	67	112	83,7	6,1	10,2

Sumber: Van der Wal, Hal 697 (S. Nasution, 1987: 135).

HBS adalah satu-satunya sekolah yang dapat melanjutkan ke perguruan negeri Belanda. Kurikulum yang diberikan tidak berbeda dengan kurikulum yang

ada di negeri Belanda tanpa ada perubahan dan dapat bertahan dari berbagai kritik, mata pelajaran yang diajarkan pun bersifat universal.

Bahannya dapat berubah dan harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu

pengetahuan, namun mata pelajarannya tetap sama.

Tabel 5. Daftar Mata Pelajaran Di HBS

Mata Pelajaran	Jumlah Jam per Minggu				
	I	II	III	IV	V
Berhitung dan Aljabar	5	5	3	2	1
Matematika	4	4	4	4	4
Mekanika	-	-	-	3	2
Fisika	-	-	4	4	3
Kimia	-	-	2	4	5
Botani	1	1	1	1	1
Biologi	1	1	1	1	1
Kosmografi	-	-	-	1	1
Undang-Undang Negara	-	-	1	1	1
Ekonomi	-	-	1	1	1
Tata Buku	1	-	1	1	1
Sejarah	3	3	3	3	3
Geografi	3	3	2	2	1
Bahasa Belanda	5	4	4	3	3
Bahasa Perancis	4	4	4	3	3
Bahasa Jerman	4	4	4	3	3
Bahasa Inggris	4	4	4	3	3
Menggambar Tangan	2	3	2	2	2
Menggambar Garis	-	-	2	2	1
	36	36	43	43	40

Sumber : Kurikulum HBS terdiri atas 19 mata pelajaran di antaranya 11 mulai dari kelas I, ditambah 6 buah di kelas III dan 2 lagi di kelas V (S. Nasution, 1987: 132).

Kurikulum yang diberikan di sekolah HBS sifatnya sangat uniform bagi semua tanpa pilihan. Kurikulumnya semata-mata mengikuti yang ada di Nederland dengan tidak menghiraukan keadaan di Indonesia. Untuk periode lebih dari setengah abad sekolah inilah satu-satunya yang memberikan jalan menuju ke perguruan tinggi di Belanda.

Memasuki HBS dengan hasil yang baik merupakan kebanggaan tersendiri dimata masyarakat. Tenaga pengajar yang diterima oleh pemerintah hanya yang mempunyai ijazah Ph. D (Doktor) atau diploma M.O, adalah ijazah tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang guru yang dapat disamakan dengan gelar Doctor.

Tabel 6. Ijazah Guru-Guru di HBS

Ijazah guru	1877	1902	1910	1912
Doctor	12	16	13	13
Doctorandus	-	3	6	5
Kandidat	1	3	2	4
Diploma MO – B	20	44	53	33
Insinyur	2	14	15	4
Opsir	2	12	14	11
Diploma MO – A	6	7	9	6
Diploma LO	10	16	13	4
Tanpa Ijazah	2	9	9	-

Sumber : Algemeen Verslag Middelbaar en Lager Onderwijs voor Europeanen, 1899, 1900, 1910, 1912 (S. Nasution, 1987: 13).

HIS merupakan Sekolah Dasar yang diperuntukkan bagi kalangan atas anak-anak pribumi asli. Alasan didirikannya HIS adalah keinginan yang kuat dari kalangan orang

Indonesia untuk memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan Barat. Pada awalnya pendirian sekolah ini menimbulkan keberatan dikalangan pemerintah Belanda, dikarenakan

bahwa sekolah ini akan menimbulkan masalah pengangguran pada kalangan kaum intelektual yang tidak terserap oleh pemerintah dan perusahaan swasta. Ada pula yang merasa keberatan karena adanya pandangan biaya yang besar yang diperlukan untuk menyelenggarakan sekolah ini sehingga mengurangi anggaran biaya untuk memberantas buta huruf. Ada pula yang merasa takut jika kelompok nasionalis yang terdidik akan menyamai dan menyaingi orang Belanda. Pada awalnya HIS bernama Sekolah Kelas Satu dan pada tahun 1914 telah resmi bernama *Hollands Inlandse School*.

Dalam Statuta 1914 No. 764, kurikulum HIS merupakan semua mata pelajaran ELS bukan kelas satu dengan perbedaan diajarkan membaca dan menulis bahasa daerah dalam aksara latin dan Melayu dalam tulisan Arab dan Latin. Kemudian pada tahun 1915 tidak meliputi bernyanyi dan pendidikan jasmani. Sejarah dianggap sensitif dari segi politik sedangkan bernyanyi dan pendidikan jasmani belum ada guru-guru yang kompeten dibidangnya. Membaca di kelas satu bertujuan untuk menguasai keterampilan membaca yang pada umumnya diberikan dalam tiga bahasa yaitu bahasa daerah, Melayu dan Bahasa Belanda. Mata pelajaran yang paling penting adalah Bahasa Belanda. Pelajaran ini meliputi 43,9 % dari seluruh waktu pelajaran. Mata pelajaran lain juga digunakan untuk mempelajari bahasa ini. Lulusan HIS relatif banyak yang lulus dalam ujian pegawai rendah (*Klein Ambtenaar Examen*), ini merupakan sebuah bukti dari keberhasilan HIS. Namun kurikulum yang diterapkan tidak disesuaikan dengan kebutuhan anak dan masyarakat Indonesia tetapi disesuaikan dengan Belanda. Buku-buku yang dipelajari merupakan buku yang ditulis oleh pengarang Belanda yang memandang Indonesia dari segi pandangannya sendiri. Oleh karena itu pendidikan HIS sangat kental dengan unsur-unsur ke-Belandaan.

HIS merupakan lembaga utama untuk memperoleh pendidikan Barat, khususnya mempelajari Bahasa Belanda karena Bahasa Belanda sangat penting sebagai kunci untuk menempuh pendidikan lanjutan, sebagai sarana untuk masuk

kebudayaan Barat dan syarat untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan menguasai Bahasa Belanda juga bisa membuat seseorang masuk ke dalam golongan elit intelektual. Untuk mengajarkan Bahasa Belanda dibutuhkan guru-guru Belanda, akan tetapi karena sulitnya memenuhi kebutuhan guru di HIS yang senantiasa bertambah, maka digunakan guru-guru Indonesia lulusan dari HKS (*Hogere Kweek School*). Kepala yang ditunjuk adalah orang Belanda yang mempunyai *Hoofdacte* atau ijazah Kepala Sekolah, akan tetapi orang Indonesia juga bisa menjadi Kepala Sekolah apabila memiliki H.A (*Hoofdacte*).

Sama halnya dengan Sekolah Kelas Satu, HIS dimaksudkan sebagai sekolah untuk golongan elit dan pada prinsipnya sekolah ini diperuntukkan bagi golongan sosial atas. Namun sulit untuk menentukan siapa yang termasuk golongan atas tersebut karena dalam pelaksanaannya anak-anak golongan atas tidak mencukupi dan lebih menyukai masuk ELS, walaupun secara resmi diploma HIS sama dengan diploma ELS, akan tetapi di mata masyarakat ELS lebih dihargai. Karena kekurangan murid golongan atas tersebut maka golongan rendah mendapat kesempatan belajar dan banyak diantara mereka yang berbakat intelektual kemudian mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari pada anak golongan aristokrasi. Berdasarkan peraturan pemerintah, anak-anak yang dapat menempuh pendidikan di HIS ditentukan oleh empat kategori, yakni keturunan, jabatan, kekayaan, dan pendidikan. Dengan demikian anak-anak wedana, demang dan anak-anak yang orang tuanya berpendidikan minimal MULO, atau anak-anak yang orang tuanya berpenghasilan minimal f. 100 sebulan dapat menempuh pendidikan di HIS. Akan tetapi, pada kenyataannya HIS ternyata juga membuka kesempatan bagi golongan swasta dan golongan yang berpenghasilan rendah. Berdasarkan penelitian yang diadakan oleh Komisi HIS ternyata sejak tahun 1912 terlihat persentasi dari kalangan pegawai pemerintah semakin rendah. Kecenderungan ini lebih terlihat pada perbandingan latar belakang murid sekolah *Schakel*, yaitu sekolah yang merupakan perantara antara sistem Bumiputera dan sistem Belanda.

Tabel 7. Jumlah Murid di HIS

Tahun	Jumlah Murid
1914	18.181
1916	20.737
1921	38.211

Sumber: S. Nasution. 1987. Dalam Sejarah Pendidikan Indonesia. Hal 117.

Pada tahun 1916 populasi HIS seluruhnya berjumlah 20.737 diantaranya 3.338 atau 16% anak wanita dan kebanyakan dari golongan atas. Di Jawa maupun di pulau-pulau lain, kebanyakan gadis adalah anak pegawai. Di Jawa 77,7% anak wanita berasal dari golongan bangsawan dan di luar Jawa 59,1%. Pegawai pemerintah yang telah menerima pendidikan Barat, rupanya progresif dalam sikapnya untuk menyekolahkan anak-anak gadisnya.

OSVIA merupakan Sekolah Dasar yang disediakan bagi anak-anak golongan bangsawan. Sekolah ini pada mulanya didirikan di Tondano (1865-1872 sebagai percobaan) dan di Bandung, Magelang, dan Probolinggo (1878) yang dalam bahasa sehari-hari disebut Sekolah Raja (*Hoofdenschool*) dengan bahasa pengantar Bahasa Melayu dan Bahasa Belanda, dan dimaksudkan untuk kepentingan administrasi pemerintahan Hindia Belanda bagi anak-anak tokoh terkemuka Bumiputera. Tetapi sekolah raja tersebut kemudian diintegrasikan ke ELS atau HIS. Pada tahun 1900 Sekolah Raja tersebut mengalami reorganisasi dan diberi nama OSVIA. Untuk masalah keturunan merupakan faktor yang sangat penting dalam penerimaan murid di OSVIA. Meskipun uang pembayaran sekolah disesuaikan dengan penghasilan orang tua, bagi keluarga berpenghasilan rendah yang menyekolahkan anaknya di OSVIA biaya tersebut dirasakan sangat mahal. Penerimaan siswa sering harus disertai surat rekomendasi pribadi pejabat *Binenlandsch Bestuur* (BB) dan para bupati. Sedangkan bupati-bupati tersebut menggunakan haknya untuk mengajukan sanak saudaranya dan orang-orang yang disukainya.

Pada tahun 1900, OSVIA membuka cabang di tiga tempat yakni, Serang, Madiun, dan Blitar. Pembukaan cabang tersebut dilakukan karena jumlah murid OSVIA

meningkat dua kali lipat. Para lulusan OSVIA sebagian mempunyai peranan sebagai pemimpin dan gerakan-gerakan untuk memperbarui korps pegawai pada masa pemerintahan kolonial. Disamping itu, diantara lulusan OSVIA tersebut ada yang terjun dalam Pergerakan Nasional seperti HOS Tjokroaminoto sebagai tokoh Serikat Islam (SI) dan Soetardjo Arthohadikoesoemo yang bergabung dalam organisasi Budi Utomo (BU). Tingkat lanjutan dari sekolah OSVIA adalah MOSVIA atau *Middelbare Opleiding voor Indische Ambtenaren* (setingkat SMTA).

Pada dasarnya lembaga-lembaga pendidikan yang disediakan oleh pemerintah Hindia Belanda selalu mengalami perkembangan jumlah setiap tahunnya begitu pula dengan jumlah murid yang memasuki sekolah-sekolah tersebut. kebijakan pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap keturunan Bumiputera sangatlah tidak efisien. Keadaan seperti ini memang sengaja diciptakan dikarenakan pemerintah Hindia Belanda berkeinginan agar orang-orang Bumiputera tidak menduduki jabatan penting dalam pemerintahan. Jadi kebijakan pendidikan bagi rakyat Bumiputera diselenggarakan secara sederhana dan kurang efisien karena pendidikan yang diberikan kepada rakyat jajahan hanya sebagai pemenuh kebutuhan kepentingan kolonial bukanlah untuk mencerdaskan dan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan tentang Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Mengenai Pendidikan Bagi Kaum Bangsawan Di Indonesia Tahun 1900-1920, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Pemerintah Hindia Belanda dalam melaksanakan kebijakan dalam bidang pendidikan bagi kaum bangsawan di Indonesia dalam bentuk mendirikan lembaga-lembaga sekolah, yaitu : *Europese Lagere School* (ELS), *Hogere Burger School* (HBS), *Hollands Inlandse School* (HIS), *Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA). Kebijakan pemerintah

Hindia Belanda khususnya mengenai pendidikan lebih diutamakan bagi para kaum bangsawan Bumiputera dengan tujuan Pemerintah Hindia Belanda ingin menciptakan kelompok elite yang terpisah dengan masyarakatnya sendiri. Para kaum bangsawan ini diharapkan oleh pemerintah Hindia Belanda agar menjadi pemimpin yang berjiwa kebarat-baratan yang akan digunakan sebagai alat oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk melangsungkan penjajahannya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ary. H. Gunawan. 1995. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Clifford Geertz. 1983. *Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Depdikbud. 1986. *Pendidikan Di Indonesia Dari Jaman ke Jaman*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1977. *Pendidikan Di Indonesia 1900-1940*. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode-Metode Penelitian*. Gramedia : Jakarta.
- Nugroho Notosusanto. 1983. *Mengerti Sejarah*. Universitas Indonesia : Jakarta.
- Robert Van Niel. 1987. *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta : Pustaka Jaya.
- Sartono Kartodirjo. 1993. *Pengantar Sejarah Indonesia: Sejarah Pergerakan Nasional*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Halaman 28.
- Sayuti Husin. *Pengantar Metodologi Riset*. CV. Fajar Agung : Jakarta.
- S. Nasution. 2008. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sumarsono Mestoko. 1986. *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta : Balai Pustaka. Halaman.

